
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI

Abstract

The policy of Accelerating Food Consumption Diversification (P2KP) is basically to reduce the dependence on rice this is due to the switch function of rice fields that changed the function of building in the form of housing and factory and replace the rice as carbohydrates with potatoes, sweet potato, purple yam, taro, breadfruit, maize, banana beside that also with replacement of staple food source with other type is expected to improve the quality of nutrition, and also optimize of yard area through model of home gardening (KRPL) to guarantee the availability of fresh vegetables for self consumption or sold by group, from KRPL This shows the benefits received by citizens who can save household expenses, so as to produce reduced family burden of about Rp. 150.000, - to 250.000, - / month. Program optimization of yard utilization can increase community participation to participate in agriculture development in particular, and involvement of woman role joined in Group can give opinion starting from planning stage until implementation, can innovate with technology of agriculture field.

Keywords : Policy Implementation, Community Empowerment, Sustainable Food House Area.

Asep Hidayat

E-mail: dr.asephi62@gmail.com

Dosen Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati Bandung

A. PENDAHULUAN

Percepatan penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) merupakan upaya implementasi dari 22 Tahun 2009 tentang percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal selanjutnya ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal untuk mendorong upaya penganeekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta tumbuhnya kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Sebagai bentuk keberlanjutan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal telah dimulai sejak 2010 dan pada tahun 2015

diimplementasikan melalui kegiatan : (1) optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) , (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) serta (3) sosialisasi dan promosi P2KP, melalui tiga kegiatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik serta untuk mengentaskan kemiskinan bagi keluarga yang berpendapatan rendah , hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk pemanfaatan pekarangan secara intensif, ramah lingkungan dan berkelanjutan mengacu pada empat prinsip yaitu : (1) ketahanan pangan dan kemandirian pangan, (2) diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, (3) konservasi sumber daya genetik dan (4) upaya lestari melalui kebun bibit desa menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut disamping melibatkan pemerintah daerah kabupaten Bandung dijalin kerjasama dengan pihak swasta berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) program kemitraan dan Bina Lingkungan baik di bidang pangan maupun bidang lainnya kepada kelompok wanita dan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Pelaksanaan gerakan P2KP di tingkat Kabupaten dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan ekonomi daerah baik

dalam pelaksanaan maupun pembiayaannya. Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai agen pembawa perubahan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat, aktif dan produktif bagi keluarga yang kurang mampu.

Persoalan yang dihadapi dalam pembangunan oleh Indonesia, mengakibatkan tingginya konversi lahan berdampak terhadap produksi cenderung tetap bahkan berkurang. Kelangkaan pangan dan semakin bertambahnya penduduk mengakibatkan kenaikan harga pangan. Kenaikan harga pangan merupakan salah satu faktor pemicu kenaikan tingkat inflasi. Tingkat inflasi Indonesia dari tahun ketahun berfkultuasi hal ini dikaibatkan oleh beberapa faktor yang memicu inflasi termasuk kelangkaan pangan dan faktor lainnya, kondisi demikian dapat dikatakan masih baik dan relatif terkontrol, akan tetapi diperlukan kewaspadaan terhadap bahan makanan yang setiap tahun sering menyumbang inflasi terbesar. Tingkat inflasi perlu dijaga dengan mengamankan stok dan harga pangan serta disisi lain tentunya sangat berdampak terhadap masyarakat yang kurang mampu dengan semakin naik harga pangan dan kelangkaan pangan dan pemenuhan terhadap gizi jauh dari harapan.

Kebijakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga, upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan seperti aneka umbi, sayuran, buah serta budidaya ternak kecil dan ikak ketersediaan pangan sumber karbohn sebagai tambahan untidrat, vitamin, mineral dan protein, optimalisasi pekerangan dengan penddekatan pengembangan pertanian berkelanjutan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom*) sehingga kelestarian alam tetap terjaga.

Perubahan paradigma yang tadinya masyarakat Indonesia adalah sektor agraris menuju ke sektor industrialisasi dengan sendirinya merubah pola pikir dan lingkungan sosial munculnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja dan pekerjaan yang mobile telah melemahkan lembaga-lembaga yang dapat berperan sebagai struktur penghubung antara kelompok masyarakat lemah dengan masyarakat meluas, Sennet dan Cabb dalam Suharto (2014) menyatakan bahwa : ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa fafaktor seperti ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan

finansial, ketiadaan pelatihan dan adanya ketegangan fisik maupun emosional,

Memperhatikan kondisi yang dijelaskan tersebut untuk seseorang menjadi berdaya diantaranya memerlukan adanya akses terhadap finansial dan informasi serta informasi yang mendukung untuk dapat bangkit dan berperan dalam kegiatan pembangunan , saat ini pemahaman terhadap potensi yang dimiliki seseorang dan kemudian dikembangkan sangatlah perlu ketidakberdayaan ini sebagian besar terdapat diwilayah perdesaan hal ini diakibatkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, bisa saja hal ini diakibatkan oleh jaman kolonial dulu sehingga masyarakat dibiarkan yang kedua bisa saja masyarakat perkotaan hal ini diakibatkan oleh gaya hidup masyarakat perkotaan sehingga masyarakat lebih enak bekerja di sektor industri sebagai buruh pabrik dan tidak tertarik lagi untuk bekerja di bidang pertanian dan kecenderungan perdesaan yang didominasi oleh persawahan karena adanya kekuranganadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Kieefner dalam Suharto (2014) menyatakan pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang antara lain :

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.

- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan masyarakat yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis

Konsep KRPL ini di wilayah Kabupaten Bandung di setiap desa dibangun kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak, atau ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani Kabupaten Bandung yang terdiri dari 31 Kecamatan dengan jumlah desa 270 Desa tidak semua desa mendapatkan kegiatan KRPL hal ini diakibatkan keterbatasan anggaran dengan demikian secara bergiliran akan mendapatkan program KRPL ini sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan, adapun kelompok sasaran kegiatan

optimalisasi pemanfaatan pekarangan adalah kelompok wanita yang beranggotakan minimal 15 orang yang berdomosili berdekatan dalam satu desa, setiap anggota wajib memanfaatkan pekarangan dengan tanaman sumber pangan (sayuran, buah, umbi-umbian dengan tujuan untuk mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat keluarga atau rumah tangga. Hasil usaha dari pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat diberikan atau disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok dan hasil penjual tersebut masuk dalam kas kelompok untuk dipergunakan membeli bibit tanaman agar terciptanya kelestarian, karena intervensi pemerintah terhadap program ini terbatas.

Peran masyarakat yang didorong untuk lebih aktif lagi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tidak saja dalam pemanfaatan pekarangan akan tetapi melalui inovasi teknologi baik itu inovasi pemupukan, inovasi bibit varietas unggul, inovasi lembaga pemasaran, inovasi media tanam, inovasi pengendalian hama penyakit model pengembangan optimalisasi pemanfaatan pekarangan ini sangat cocok bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan yang luas baik di perdesaan maupun di perkotaan karena lahan pertanian semakin sempit yang mengakibatkan ketersediaan dan akses terhadap bahan pangan sangat terbatas,

kondisi demikian kebutuhan makanan manusia tidak dapat berhenti karena ketiadaan lahan, pemerintah terus berupaya dengan mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan menyiapkan atau kebijakan yang mendorong pemanfaatan pekarangan di lahan sempit, karena bagaimanapun ketersediaan bahan pangan harus tercukupi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi suatu kebijakan atau program tidak dilaksanakan dalam suatu ruang yang kosong karena didalamnya berbagai berbagai faktor yang antara lain kondisi geografis, sosial, ekonomi dan politik yang memiliki kontribusi yang penting, diantara berbagai faktor tersebut faktor politik yang dianggap memiliki pengaruh yang penting dalam proses implementasi.

Toreviled dan Thomson dalam Purwanto (2015) menyebutkan adanya tawar menawar politik (*political bargaining*) dalam proses implementasi. Dengan adanya tawar secara politik merupakan relitas yang tidak dapat dihindarkan ketika proses implementasi terjadi di lingkungan publik yang mengandung kepentingan yang bersifat heterogen. Ada kelompok sebagiyang menikmati manfaat secara positif dari implementasi program, akan tetapi ada kelompok yang menderita keruhian akibat dari adanya implementasi dan disinilah proses tawar menawar menjadi bagian yang penting dalam proses implementasi.

Implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah tiada lain untuk kepentingan masyarakat lebih sejahtera dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan sejalan dengan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung terjadi adanya pergeseran tata nilai kehidupan masyarakat yang tadinya masyarakat bergerak di bidang pertanian atau agraris beralih ke industrialisasi, dengan adanya perubahan dari agraris ke industialisasi akan merubah pola pikir dan pola hidup.

Kebijakan publik akan berujung pada tindakan pemerintah (*Governmental actions*) yang didukung oleh dua hal yaitu : sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan nilai-nilai yang ingin dicapai, tindakan pemerintah tidak dilakukan diruang yang kosong melainkan dalam konteks dimana tindakan-tindakan individu maupun lembaga non pemerintah juga terjadi Kiviniemi dalam Purwanto (2015).

Tindakan pemerintah yang dilakukan tiada lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat, tentunya pemerintah melakukan suatu tindakan yang didorong oleh suatu keinginan kuat supaya d masa yang akan datang bahwa implementasi menjadi lebih baik bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun masyarakat yang menerima manfaat tidak saja yang merugikan masyarakat akan tetapi pula manfaat positif yang dirasakan manfaat oleh masyarakat.

Demikian pula dengan perubahan perilaku dan pola pikir serta sudut pandang masyarakat dalam menyikapi terjadinya perubahan fungsi lahan yang terjadi hampir di sebagian besar lahan yang berada di Pulau Jawa dengan sendirinya akan merubah pola pikir dari sudut sosial budaya, ekonomi dan politik seperti yang terjadi dilahan pertanian yang berada di Kabupaten Bandung membentang pesawahan di beberapa kecamatan seperti Rancaekek, Majalaya, Solakanjeruk, Bojongsoang, Cileunyi, Cicalengka, Katapang, Banjaran, Nagreg seiring dengan pertumbuhan pembangunan dan laju pertumbuhan yang begitu cepat maka dalam beberapa dekade mengalami perubahan dengan beralih fungsinya yang semula lahan persawahan menjadi bangunan lahan sawah menjadi habis yang ada tinggal bangunan perumahan atau pabrik dan akan berakibat terhadap produksi beras yang menjadi bahan pangan pokok masyarakat Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk kurang lebih 3,5 juta penduduk dan berakibat pula terhadap penurunan produksi beras.

Melihat kondisi tersebut pemerintah menerbitkan aturan Peraturan Presiden nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal, peraturan ini merupakan pedoman

untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerjasama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang bertujuan meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dan meningkatkan peran, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras.

Munculnya gelombang demokratisasi implementasi juga tidak lepaas dari pengaruh pemikiran tentang pentingnya mengadopsi nilai-nilai demokratisasi untuk menjelaskan kegagalan dan keberhasilan implementasi, pemikiran tersebut tidak lepas dari fakta secara empiris yang memperlihatkan bahwa pembuatan kebijakan publik dilakukan secara demokratis pada akhirnya akan menimbulkan suasana yang kondusif bagi keberhasilan implementasi, demikian pula dengan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang mencakup optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL pada dasarnya memanfaatkan pekarangan yang berada di sekitar rumah warga di wilayah Kabupaten Bandung berdasarkan data mencakup kurang lebih 3 juta m2

lahan pekarangan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dibiarkan begitu saja, sebagaimana dikemukakan oleh Stich dan Eagle dalam Purwanto (2015) mengungkapkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi yang seharusnya dipahami lebih dari sekedar adanya kebutuhan atau tuntutan demokrasi, keterlibatan masyarakat memiliki makna yang jauh lebih penting sebagai model pembelajaran bersama antara pemerintah dengan masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan halaman di sekitar rumah masing-masing dapat ditanami sayuran dengan teknologi yang sederhana dapat menggunakan bekas bungkus minyak goreng atau semacam dapat dipakai sebagai pengganti polybag untuk ditanami sayuran dengan usia panen 20-25 hari dapat dipanen seperti kangkung, pakcoy, salada bokor, dan lain sebagainya hasilnya dapat dikonsumsi oleh masing-masing anggota kelompok yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) yang wilayahnya berdekatan satu hamparan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok bagaimana cara berorganisasi yang baik, cara mengambil keputusan, manajemen pasca panen, penanganan hama penyakit tanpa menggunakan bahan-bahan kimia akan tetapi memakai bahan organik.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses implementasi berdasarkan data yang diperoleh disebabkan antara lain : kelompok

(*sasaran beneficiaries*) tidak terlibat dalam implementasi program, program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, adanya korupsi, 4 sumberdaya manusia yang kapasitasnya rendah dan tidak adanya koordinasi dan monitoring.

Di Indonesia banyak contoh kegagalan implementasi kebijakan maupun program, kegagalan yang terjadi tidak jauh berbeda dengan kegagalan yang ditemukan di negara lain contoh dalam program optimalisasi lahan pekarangan melalui model Kawasan Rumah Pangan Lestari, kesinambungan atau lestari dalam program tersebut tidak bertahan lama paling bagus hanya dalam satu tahun selebihnya nyaris tidak ada bekas atau rata dengan tanah, disamping itu ketiadaan bibit yang seharusnya ada di kebun bibit desa pada saat diperlukan ternyata tidak ada atau habis dan masih banyak lagi kasus seputar Kawasan Rumah Pangan Lestari ini. Namun demikian tidak semuanya mengalami kegagalan tapi masih ada kelompok yang berhasil dan bertahan berkat adanya intervensi anggaran dan sarana prasarana lain dari pemerintah desa.

Tentunya untuk memperbaiki kegagalan tersebut dicari permasalahan yang menyebabkan kegagalan dengan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan strategi yang disesuaikan dengan tipe kegagalan yang terdiri dari 4 tipe yaitu pendapat dari Goggin dalam

Purwanto (2015) : 1). Penyimpangan (*defiance*) terjadinya pengunduran atau bahkan pembatalan oleh implementer yang disertai perubahan-perubahan, baik tujuan, kelompok sasaran maupun mekanisme implementasi yang berakibat tidak tercapainya tujuan, 2). Penundaan (*delay*) penundaan tanpa modifikasi, dalam kasus ini implementer menunda pelaksanaan implementasi, namun tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap isi kebijakan, 3). Penundaan strategis (*strategic delay*) penundaan disertai modifikasi yang bertujuan memperbesar keberhasilan implementasi dan 4). Taat (*compliance*) dimana implementer menjalankan implementasi tanpa disertai dengan perubahan terhadap isi dan mekanisme implementasi kebijakan tersebut.

Proses implementasi merupakan proses yang rumit sehingga implementasi berujung pada kegagalan banyak diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang kurang baik, masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga dukungannya rendah, serta proses monitoring yang tidak berjalan dengan baik. Tentunya implementasi yang dan diterima oleh masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan, kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan

kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).

Memperhatikan pendapat tersebut di atas bahwa pemberdayaan masyarakat merujuk pada kemampuan orang untuk berbuat sesuatu agar dapat meningkatkan kapasitas seseorang berpartisipasi dalam pembangunan sehingga memiliki kebebasan baik mengemukakan pendapat, berinteraksi dalam kehidupan sosial dan juga mendapatkan informasi sehingga pada saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi.

Adedokun, et al., (2010) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa ketika kelompok masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat dari pada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bahwa para pemimpin masyarakat serta agen pengembangan masyarakat harus terlibat dalam komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota masyarakat dalam isu-isu pembangunannya.

Partisipasi aktif Kelompok Wanita Tani tidak hanya sekedar untuk mengupayakan keterlibatan kelompok ini dalam pembangunan khususnya pembangunan dibidang pertanian akan tetapi dapat terlibat secara langsung dengan diberikan pembekalan berupa bimbingan teknik tentang bagaimana teknik pemasaran yang baik dan tata cara pembuatan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam pengelolaan budi daya tanaman di halaman rumah benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat, tidak saja dikonsumsi akan tetapi juga dijual dan hasil penjualan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok untuk menjaga kelestarian program ini, di wilayah Kabupaten Bandung setiap desa diberikan program KRPL satu kecamatan untuk satu desa

sehingga setiap tahun mulai dari tahun 2014-2016 sudah 120 desa yang dari 190 Desa, 10 Kelurahan mendapatkan program KRPL ditambah dengan dilingkungan kantor kompleks pemerintah daerah Kabupaten Bandung Soreang sebanyak 30 kantor dengan demikian tidak saja di desa atau kecamatan akan tetapi juga di kompleks perkantoran untuk memberikan contoh kepada masyarakat dan dijadikan sebagai percontohan yang dapat dikembangkan.

Maksud dari kebijakan pemerintah untuk penyebaran program percepatan konsumsi pangan melalui model KRPL tersebut adalah pemanfaatan pekarangan di wilayah desa dan diharapkan tidak hanya satu desa hanya satu kampung saja akan tetapi diseluruh desa dapat mengembangkan pemanfaatan pekarangan secara menyeluruh satu kawasan desa serta pada akhirnya hampir di setiap desa ada penyebaran dan pengembangan optimalisasi pekarangan, disamping untuk meningkatkan kualitas mutu dan gizi masyarakat dengan memakan sayuran hasil dari KRPL juga untuk menjaga lingkungan dengan memanfaatkan barang bekas yang dapat dijadikan sebagai media tanaman dan adanya transfer teknologi dalam memanfaatkan pekarangan tidak saja secara manual menggunakan tanah yang ditempatkan dalam kantong bekas minyak goreng atau kerepek serta menggunakan teknik vertikultur yang diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki halaman yang kecil

dapat ditanami sayuran sehingga bermanfaat.

Kawasan Rumah Pangan Lestari masyarakat di Kabupaten Bandung yang terdiri dari 31 Kecamatan dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga berkisar antara Rp 150.000,- - Rp. 250.000,- tiap bulan kalau dikalikan dengan 31 Kecamatan ratusan juta dapat dihemat oleh rumah tangga, sehingga model ini terus dikembangkan sehingga di Kabupaten Bandung setiap tahun bertambah terus, karena model KRPL ini merupakan inovasi yang dapat langsung dirasakan manfaat dan dampaknya pada ekonomi rumah tangga, sehingga upaya penyebaran dan pengembangannya rendah mudah dilakukan, disamping itu sebagai pintu masuk inovasi teknologi pertanian lainnya dan partisipasi aktif ibu rumah tangga menjadi perantara sosialisasi inovasi lainnya.

Pemberdayaan pada dasarnya adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan

keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan mulai dikembangkan oleh pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Rukun Warga secara berjenjang sampai ketingkat yang lebih tinggi yaitu pemerintah Kabupaten, Provinsi dan tingkat Nasional dalam kegiatan tersebut tidak semua program dapat dilaksanakan akan tetapi berdasarkan skala prioritas sesuai tingkatan pemerintah, selanjutnya disesuaikan antara program yang ada di tiap dinas dengan hasil musyawarah tersebut sehingga menghasilkan program yang nantinya bisa dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan kearah keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan (sadan,1997) memang dalam keadaan ketidak berdayaan banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa saja diakibatkan oleh kekurangan informasi yang didapatkan atau faktor ekonomi melalui program optimalisasi pemanfaatan pekarangan ini masyarakat iktu terlibat secara aktif dalam meningkatkan pendapatan akan tetapi juga masyarakat khususnya kaum wanita yang terlibat dalam kelompok wanita tani mengikuti proses pembelajaran yang tergabung dalam organisasi belajar untuk

berorganisasi, menyampaikan saran dan pendapat serta kritik untuk kemajuan organisasi yang dipimpin, sehingga kaum wanita ini dapat menghapuskan asumsi yang miring bahwa wanita suka bergunying, oleh hal-hal yang kurang bagus dengan program ini ada kegiatan yang lebih positif menghasilkan suatu karya dengan disibukan oleh kegiatan secara berkelompok untuk menanam sayuran membudidayakan tanaman dan mengatasi hama penyakit secara mandiri dengan ilmu yang didapatkan dari sosialisasi yang didapatkan dari penyuluh pertanian yang berada di daerah masing-masing.

Ruang lingkup kegiatan Program Percepatan Konsumsi Pangan ini terdiri atas :

a. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga, upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga. Pendekatan pengembangan dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal

(*local wisdom*) sehingga kelestarian alam tetap terjaga. Di setiap desa dibangun kebun bibit memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak dan atau ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan, kelompok sasaran kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan adalah kelompok wanita yang beranggotakan 15 orang yang berdomosoli berdekatan dalam satu desa, dan setiap anggota wajib memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan hasil usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan atau disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok.

b. Model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L). Dalam rangka mengembalikan pola konsumsi masyarakat kepada budaya dan potensi setempat, pemilihan komoditas pangan yang akan dikembangkan melalui penyediaan teknologi pengolahan yang lebih modern mengacu kepada potensi dan kebutuhan setempat. Pada prinsipnya kegiatan MP3L dilaksanakan untuk mengembangkan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pangan

bersubsidi bagi keluarga yang berpendapatn rendah kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan berbagai instansi terkait yang bertujuan untuk : mengembangkan beras/nasi yang berasal dari pangan lokal sumber kerbohidrat selain beras yang dapat disandingkan dengan nasi yang berasal dari beras, mengembalikan budaya masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan pangan selain beras, perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayuran dan buah.

- c. Sosialisasi dan promosi P2KP Mensyaratkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebarluasan informasi, perubahan sikap dan perilaku serta ajakak memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga untn unkn pola hidup yang sehat, aktif dan produktif.

Kepemimpinan formal berperan sentral sebagai panutan dan tokoh penggerak dalam P2KP, sedangkan kepemimpinan informal berperan sebagai panutan dalam mendukung gerakan ini pelaksanaan kegiatan ini memerlukan dukungan, peran serta dan sinergi dari lembaga/instansi dan pemangku

kepentgingan di berbagai lingkungan organisasi. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL telah terbukti banyak memberikan manfaat bagi masyarakat baik bagi anggota kelompok wanita maupun lingkungan di kawasan di sekitarnya, bagi pelaku anggota kelompok wanita memberikan sumbangan pangan untuk dikonsumsi bagi keluarga, menghemat pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari-hari dan diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga, serta bagi lingkungan kawasan kegiatan ini dapat menciptakan suasana asri dan lebih nyaman.

Pengembangan kawasan rumah pangan lestari untuk berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan diperlukan teknik yang tepat dalam pelaksanaannya, mekanisme pengembangan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain : (1) pembentukan kelompok, (2) identifikasi kebutuhan, (3) penyusunan rencana kegiatan, (4) sekolah lapangan dan pelatihan, (5) pembuatan dan pengelolaan kebun bibit, (6) pengembangan demplot kelompok dan penataan pekarangan KRPL.

Model KRPL disamping memberikan motivasi dan inovasi di bidang pertanian dengan lahan yang sempit juga memberikan peluang yang potensial karena dapat memberikan akses pangan yang lebih luas bagi konsumen miskin di daerah pedesaan juga perkotaan, dapat memberikan ketersediaan produk pangan yang lebih segar karena tidak

menggunakan bahan kimia, berpotensi menciptakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan kalau dikelola dengan benar oleh kelompok yang tergabung dalam KRPL dan memiliki keuntungan akses yang lebih luas dan lebih mudah tawarhadap sumber informasi dan pengolahan limbah serta dapat mengurangi kebutuhan pengepakan, penyimpanan dan transportasi, namun demikian adanya peluang tersebut tidak terlepas dari kendala yang dihadapinya yaitu : minimnya sumber daya manusia bidang pertanian karena umumnya masyarakat baik perdesaan maupun perkotaan bekerja di sektor non pertanian, daya saing pertanian di daerah pertanian relatif karena dianggap kurang menarik dan memberikan hasil memuaskan.

Disamping hal tersebut dengan adanya model KRPL meningkatkan peran wanita yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam kelompok tersebut wanita sebagai masyarakat dapat ikut terlibat secara aktif memberikan saran dan pendapat dalam pembangunan pertanian bagaimana cara menangani hama dan penyakit tanaman yang sebelum tidak mengetahuinya berdasarkan pengalaman yang diketahuinya kelompok wanita tani ini menerapkan hasil temuannya dengan menggunakan organik yang berada disekitar lingkungan, disamping itu pula bagaimana mengemukakan pendapat dalam suatu organisasi dan teknik pengambilan keputusan untuk kelancaran organisasi serta

mengelola hasil tanaman dan memasarkan yang baik, semua itu bagaimana meningkatkan peran wanita dalam berpartisipasi dalam pembangunan, melestarikan alam dengan demikian pembangunan terus berjalan tanpa adanya perusakan alam.

Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan ini adalah merupakan hal penting yang menjadi model pengembangan KRPL serta tidak saja memanfaatkan pekarangan untuk ditanami sayuran dan tanaman obat akan tetapi hasil tanaman dan pemanfaatan pekarangan tersebut dapat juga masyarakat secara bersama-sama mengolah makanan dapat bisa dijadikan minuman seperti pakcoy disatukan dengan nanas menjadi minuman yang menyegarkan sekaligus obat untuk darah tinggi, kolesterol dan masih banyak khasiat dari sayuran yang ada disekitar rumah untuk Kabupaten Bandung makanan olahan hampir tersebar di tiap kecamatan dengan kearifan lokal dan sesuai dengan potensi ada di kecamatan yang bersangkutan.

Pemberdayaan melalui pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia, dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga

sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat atau melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat kelompok masyarakat, pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Sipahelut, 2010). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).

Pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan di tingkat masyarakat, pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada. Masyarakat sebagai sebuah fenomena struktural dan mempunyai sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi ketika melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan dasar dalam kewajiban sosial yang individu memiliki terhadap masyarakat yang mengembangkan bakat mereka.

Jimu (2008) menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat tidak khususnya masalah ekonomi, teknis atau infrastruktur. Ini adalah masalah pencocokan dukungan eksternal yang ditawarkan oleh agen pembangunan pedesaan dengan karakteristik internal sistem pedesaan itu sendiri. Oleh karena itu, agen pembangunan pedesaan harus

belajar untuk ‘menempatkan terakhir terlebih dahulu’ . Secara teori, peran pemerintah pusat dan agen luar lainnya harus menginspirasi inisiatif lokal bahwa hal ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya, top-down perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan harus memberi jalan kepada bottom-up atau partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai apa yang disebut ‘pembangunan melalui negosiasi’. Hal ini sesuai Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) power merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan power dalam empowerment adalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah (Bottom-Up).

Pemberdayaan partisipasi aktif masyarakat dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua

kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat, 2002).

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 dalam Sukmaniar, 2007). Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya

dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010).

Implementasi kebijakan tentang penganekaragaman konsumsi pangan bertujuan adalah untuk mengurangi konsumsi dan ketergantungan terhadap beras karena kondisi areal sawah yang berada di Kabupaten Bandung semakin berkurang dan berdampak terhadap produksi beras yang menurun, untuk mengatasi kondisi tersebut ditempuh dengan program optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan yang meliputi optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL dan model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) karbohidrat bisa didapatkan tidak saja dari beras akan tetapi bisa didapatkan dari jagung, ketela pohon, ubi jalar, talas, sukun dan pisang dapat dijadikan makanan pokok sebagai pengganti beras untuk wilayah Kabupaten Bandung bahan-bahan pengganti beras tersebut diatas cukup tersedia dan melimpah.

Apabila kita cermati dari serangkaian literature tentang konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/ daya kepada kumpulan masyarakat yang berada

pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

. Pemerintah sebagai fasilitator dalam kegiatan Kawasan Rumah Pangan lestari diperlukan oleh masyarakat dimasa yang akan datang adalah dalam pemasaran karena lama kelamaan hasil dari KRPL akan melimpah tentunya pemasaran inilah yang diperlukan masyarakat, selain itu sosialisasi kepada masyarakat sangat penting dalam model pemanfaatan pekarangan dan diversifikasi pangan agar kebutuhan terhadap karbohidrat, protein, vitamin dan mineral masyarakat terpenuhi, untuk masyarakat yang berpendapatan rendah model KRPL bisa menjadi solusi dan sangat cocok untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari asalkan tidak malas dan terus berinovasi,

C. SIMPULAN

Berdasarkan kondisi dan pemaparan tewrsebut diatas bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya dikeluarkannya suatu kebijakan oleh pemerintah adalah untuk kebermanfaatan dari program yang dikeluarkan, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita, kualitas kehidupan dalam model pemanfaatan pekarangan adalah pemanfaatan pekarangan untuk ditanami sayuran dan tanaman obat, untuk meningkatkan dan memperbaiki gizi masyarakat dan mengurangi beban keluarga karena dengan adanya KRPL anggota kelompok bisa menghasilkan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 150.000,- sampai Rp. 250.000,-

Meningkatkan kegiatan kelompok wanita untuk berkreasi dan

beraktivitas dengan menanam sayuran dan berorganisasi dengan baik, adanya kegiatan yang mendukung untuk lebih berperan dalam pembangunan khusus dalam model KRPL mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan serta memasarkan hasil tanaman, disamping itu pula dapat memunculkan berinovasi. Inovasi kebijakan publik sebagai sebuah ketidak mungkinan secara prinsip dan substantif akan memberikan penguatan dalam merespon dan menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Persoalan-persoalan seperti berpikir secara parsial dalam melaksanakan pembangunan karena kurang tepatnya analisis kebijakan, perilaku koruptif para pejabat publik, ketahanan pangan, persoalan kemiskinan dan pengangguran dan pendidikan yang rendah merupakan beberapa contoh kegagalan kebijakan publik dalam memecahkan permasalahan tersebut. Inovasi menjadi salah satu alternatif terbaik dalam dimensi kebijakan publik di masa kini dan masa yang akan datang, dimaksudkan untuk mencoba untuk memecahkan masalah dalam inovasi kebijakan publik dalam perspektif konseptual dan empiris disertai dengan berbagai contoh penerapan khususnya dalam ketahanan pangan dalam program pemanfaatan lahan pekarangan diperlukan adanya upaya sinergitas baik dari pemerintah maupun masyarakat bersama-sama mensukseskan program tersebut antara lain di bidang pemupukan,

pengendalian hama tanaman, teknologi penanganan hasil dan inovasi kelembagaan pemasaran. Meningkatkan kegiatan kelompok wanita untuk berkreasi dan beraktivitas membudi dayakan menanam sayuran tanpa menggunakan pestisida dan obat-obatan kimia yang membahayakan kehidupan manusia dan berorganisasi dengan baik, dalam kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan masyarakat lebih berperan dalam pembangunan khusus dalam model KRPL dituntut adanya kebersamaan dan solidaritas diantara kelompok wanita tani ini mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan serta memasarkan hasil tanaman, disamping itu pula dapat memunculkan inovasai antara lain di bidang pemupukan, pengendalian hama tanaman, teknologi penanganan hasil dan inovasi kelembagaan pemasaran. Pada proses pemberdayaan masyarakat pendekatan teori belajar secara konstruktivisme perlu di tanamkan dan diupayakan agar masyarakat mampu menkonstruksi pemahaman untuk berubah. Pemberdayaan masyarakat hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah melekat di masyarakat selama nilai tersebut baik dan benar. Nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, gotong-royong, kejujuran, kerja keras harus di bangun dan di konstruksikan sendiri oleh masyarakat untuk menciptakan perubahan agar lebih berdaya. Keterkaitan dengan konsep pemberdayaan maka aspek ilmu

(knowledge) yang ada di dalam masyarakat perlu dibangun dengan kuat dan di kontruksikan di dalam masyarakat itu sendiri.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abbeduto, Leonard. (2004). *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Issues in Educational Psychology Third Edition*. McGraw-Hill, Dushkin.
- Adedokun, O.M. C.W, Adeyamo, and E.O. Olorunsula. (2010) *The Impact of Communication on Community Development*. *J Communication*, 1(2): 101-105.
- Chalid, Pheni. (2005). *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Penebar Swadaya. Cetakan pertama. Jakarta.
- Chambers, R. (1985). *Rural Development : Putting The Last First*. London ; New York.
- DANIAL, R. Deni Muhammad. Meningkatkan Keunggulan Bersaing Usaha Kecil Dan Menengah (Umkm). *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 13 - 21, jun. 2017. ISSN 2579-3098. doi:<https://doi.org/10.15575/jp.v7i1.1732>.
- Dulkiah, M. (2017). Peranan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 30 - 49. doi:<http://dx.doi.org/10.15575/jp.v7i1.1735>
- Foy, Nancy. (1994). *Empowering People at Work*, London: Grower Publishing Company.
- Friedman, John. (1992). *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- Glasserfield, E. (1987). *A Constructivist Approach to Teaching*. In L. Steffe & J. Gale (Eds.), *Constructivism In Education*. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum. (pp. 3-16).
- Anwar, H. (2016). Pengembangan Umkm Masyarakat Bandung. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 102 - 123. doi:<http://dx.doi.org/10.15575/jp.v6i1.1752>
- Ife, J.W.(1995). *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.
- Koentjaraningrat. (2009): *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambangan. Jakarta. Longman.
- Lubis, Hari & Huseini, Martani. (1987). *Teori Organisasi; Suatu Pendekatan Makro*. Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta.
- Purwanto, Agus Erwan, (2015), *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Peneerbit Gava Media
- Pearsons, Talcot. (1991). *The Social System*. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

- Parson Wayne, (2006), *Policy Publik Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta, Penerbit Prenada Media Group.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Rusmanto, Joni. (2013). *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*. Zifatama Publishing. Sidoarjo.
- Sadan, Elisheva. (1997). *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers.in Hebrew. [e-book].
- Shucksmith, Mark. (2013). *Future Direction in Rural Development*. Carnegie UK Trust. England.
- Solichin, Abdul Wahab, (1991), *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.
- Soetomo. (2006). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Suharto E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wilson, Terry. (1996). *The Empowerment Manual*, London: Grower Publishing Company.
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, tentang Kebijakan percepatan Panganekaragaman konsumsi pangan .
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan
- Pedoman pelaksanaan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Tahun 2015-2016
- Depdiknas. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Jimu, M.I. 2008. *Community Development. Community Development: A Cross-Examination of Theory and Practice Using Experiences in Rural Malawi. Africa Development, Vol. XXXIII, No. 2, 2008, pp. 23-3.*
- Jasper, James M. 2010. *Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action?. Sociology Compass 4/11 (2010): pp.,965-976,10.1111/j.9020.2010.000329.x* ,New York: Graduate Center of the City University of New York
- Mubarak, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.
- Sukmaniar. (2007). *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (Ppk) Pasca Tsunami Dikecamatan*

- Lhoknga Kabupaten Aceh
Besar. Tesis. UNDIP. Semarang.*
- Sipahelut, Michel. (2010). *Analisis
Pemberdayaan Masyarakat
Nelayan Di Kecamatan Tobelo
Kabupaten Halmahera
Utara. Tesis. IPB. Bogor.*